

# **Bayang-bayang Gelap Reformasi Polri: Arogansi, Kolusi, dan Hedonisme**

**Tim CSP – Center for Strategic Policing**

## **Pendahuluan**

Reformasi Polri digagas dengan satu tujuan besar: menghadirkan kepolisian yang profesional, humanis, dan dipercaya rakyat. Namun di balik jargon, program, dan serangkaian inovasi kelembagaan, ada bayang-bayang perilaku oknum yang justru menggerus upaya mulia tersebut. Arogansi, kolusi, dan gaya hidup hedon sebagian anggota bukan hanya sekadar persoalan moral individu, melainkan menjadi cermin dari problem budaya organisasi yang belum sepenuhnya tuntas dibenahi.

Arogansi aparat yang kerap muncul di lapangan – dari nada tinggi saat berinteraksi dengan masyarakat, penyalahgunaan kewenangan, hingga tindakan represif berlebihan – menciptakan jarak psikologis yang sulit dijembatani. Kolusi dan praktik “main mata” dengan kepentingan bisnis atau kelompok tertentu menambah luka, seolah-olah hukum bisa diperdagangkan dengan harga tertentu. Di sisi lain, gaya hidup hedon yang dipamerkan melalui media

sosial, dari kendaraan mewah hingga pesta gemerlap, menimbulkan kecemburuan sosial dan mempertegas kesan bahwa sebagian polisi hidup di menara gading, jauh dari realitas rakyat yang seharusnya mereka lindungi.

Ketiga perilaku ini, meski mungkin dilakukan oleh segelintir oknum, memiliki daya rusak yang luar biasa. Citra institusi kepolisian tidak ditentukan oleh ribuan anggota yang bekerja senyap dan tulus di akar rumput, tetapi sering kali hancur hanya oleh satu tayangan viral tentang arogansi, suap, atau pamer kekayaan. Publik tidak melihat Polri sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai satu wajah yang sama: polisi. Dengan begitu, setiap perilaku menyimpang dari seorang anggota, akan langsung dipantulkan kepada institusi secara keseluruhan.

Maka, kritik ini penting untuk ditegaskan: reformasi Polri tidak akan pernah tuntas selama arogansi, kolusi, dan hedonisme masih bercokol dalam tubuh kepolisian. Ketiganya adalah musuh dalam selimut yang merusak kepercayaan, menggerus legitimasi, dan menjauhkan Polri dari identitas sejatinya sebagai aparat sipil yang hadir untuk melayani dan melindungi rakyat.

## **Arogansi Polisi: Kekuasaan yang Disalahpahami**

Arogansi adalah wajah pertama yang sering dirasakan masyarakat ketika berhadapan dengan

polisi. Ia hadir dalam bentuk suara meninggi, tatapan merendahkan, sikap meremehkan, bahkan kadang dalam tindakan represif yang berlebihan. Padahal, sejatinya kewenangan yang melekat pada seorang polisi adalah amanah, bukan senjata untuk menundukkan.

Fenomena arogansi lahir dari kesalahpahaman mendasar: mengira bahwa seragam dan pangkat adalah simbol superioritas, bukan simbol tanggung jawab. Ketika kewenangan dipandang sebagai “hak istimewa” alih-alih “beban amanah”, maka mudah sekali aparat tergoda untuk menggunakan kekuasaan demi membuktikan dominasi di hadapan rakyat. Akibatnya, yang seharusnya menjadi pelindung berubah menjadi sosok yang menakutkan.

Di jalan raya, misalnya, masyarakat sering kali mengeluhkan perilaku oknum yang lebih sibuk menunjukkan siapa yang berkuasa ketimbang menegakkan aturan dengan bijak. Di ruang pemeriksaan, nada bicara yang kasar atau intimidatif membuat warga enggan mencari keadilan. Pada momen pengamanan aksi, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional melahirkan trauma kolektif, meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar memar di tubuh.

Arogansi juga berbahaya karena ia tidak sekadar melukai hati masyarakat, tetapi menularkan kultur di internal organisasi. Anggota muda yang baru masuk akan mencontoh seniornya: bahwa menjadi polisi berarti harus tampil garang, bersuara keras, dan tidak boleh kalah di depan masyarakat. Lama-kelamaan,

ini melahirkan siklus arogan yang mengakar kuat, sulit dipatahkan, dan terlanjur dianggap “bagian dari tradisi kepolisian”.

Padahal, keberanian seorang polisi tidak diukur dari seberapa keras ia membentak atau seberapa banyak ia bisa menakuti warga. Keberanian sejati justru terlihat pada kemampuan mengendalikan diri, menjaga emosi, dan menghadapi situasi genting tanpa kehilangan kemanusiaan. Polisi yang mampu tersenyum saat menegakkan aturan, yang bisa menjelaskan dengan sabar meski dimaki, sesungguhnya memiliki wibawa yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang memilih jalan arogansi.

Arogansi adalah racun perlahan: meruntuhkan kepercayaan publik, mengikis martabat profesi, dan mengubah institusi sipil menjadi seolah-olah pasukan penakluk. Jika Polri ingin benar-benar bertransformasi, maka penghancuran budaya arogan harus menjadi prioritas. Sebab tanpa itu, setiap slogan reformasi hanya akan terdengar hampa di telinga rakyat.

## **Ilustrasi:**

Bayangkan seorang warga sederhana datang ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan motor. Dengan wajah penuh harap, ia ingin mendapat kepastian bahwa hartanya yang paling berharga akan dicari. Namun, yang menyambutnya bukanlah keramahan, melainkan tatapan dingin dan interogasi

seolah malah menyalahkan warga tersebut kehilangan motornya.

Arogansi juga tampak di jalan raya. Saat razia kendaraan berlangsung, masyarakat sering kali mendapati aparat yang lebih fokus menegur dengan nada tinggi, atau mencari-cari kesalahan si pengendara. Tidak jarang, gaya tubuh yang menantang atau cara menunjuk dengan jari telunjuk mengesankan bahwa polisi bukan sedang melayani, melainkan menguasai. Situasi ini menimbulkan ketakutan, bukan penghormatan.

Dalam skala yang lebih luas, arogansi tampak saat pengamanan aksi unjuk rasa. Oknum aparat yang memilih membubarkan massa dengan kekerasan berlebihan meninggalkan trauma sosial yang panjang. Padahal, unjuk rasa adalah hak demokratis yang dijamin konstitusi. Namun, karena dipandang sebagai “ancaman terhadap wibawa”, pendekatan yang dipilih sering kali justru represif. Inilah bentuk arogansi institusional: saat kepentingan menjaga wajah kekuasaan lebih diutamakan daripada melindungi hak warga negara.

Padahal, wibawa seorang polisi sejati lahir dari pengendalian diri, bukan dari luapan emosi. Polisi yang mampu berbicara tenang saat menghadapi provokasi, yang sabar mendengarkan keluhan panjang seorang ibu tentang kehilangan ayamnya, atau yang memilih menuntun anak muda mabuk pulang ke rumah daripada langsung menamparnya—itulah contoh keberanian sejati. Ia tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga martabat manusia.

## Kolusi sebagai Penyakit Kronis Polri

Jika arogansi adalah wajah luar yang tampak jelas di depan publik, maka kolusi adalah penyakit dalam yang lebih berbahaya karena bekerja senyap, merasuki sistem, dan merusak sendi integritas dari dalam. Kolusi tidak selalu tampil dalam bentuk besar seperti “mafia hukum” atau “jual-beli kasus”. Ia juga bisa bermula dari hal kecil yang dianggap lumrah: saling melindungi antaranggota meski ada pelanggaran, memberikan kemudahan kepada orang dekat, atau menutup mata terhadap kesalahan kolega karena merasa satu seragam.

Kolusi dalam tubuh Polri bukan sekadar stigma yang digembar-gemborkan publik, melainkan kenyataan yang kerap menampakkan diri dalam praktik sehari-hari. Salah satu contoh paling nyata dapat ditemukan dalam penanganan perkara hukum. Terkadang laporan masyarakat kecil terkatung-katung tanpa kepastian, sementara kasus yang melibatkan pihak berpengaruh bisa diproses dengan cepat dan tuntas. Bukan karena perbedaan bukti atau tingkat keseriusan, melainkan karena adanya “telepon dari atas” atau kedekatan personal dengan pejabat tertentu. Perkara bisa saja dipetieskan, digantung, atau bahkan diarahkan menuju jalur damai dengan tekanan halus, sehingga keadilan seolah menjadi barang yang bisa dinegosiasikan.

Kebiasaan semacam ini menumbuhkan kultur *“asal bukan saya yang rugi, biarlah”*. Lama-lama, batas antara solidaritas dan kolusi menjadi kabur. Solidaritas

sejati mestinya bertujuan menjaga nama baik institusi dengan mendorong rekan agar tetap berada di jalur benar. Namun dalam praktik, solidaritas sering bergeser menjadi tameng untuk menyembunyikan kesalahan. Inilah akar dari kolusi: saat loyalitas pada rekan atau kelompok lebih diutamakan daripada loyalitas pada sumpah jabatan dan kepentingan rakyat.

Kolusi juga kerap tumbuh subur karena adanya *hubungan transaksional*. Dalam penanganan perkara, misalnya, pihak tertentu bisa mendapat perlakuan istimewa karena memiliki kedekatan personal atau relasi dengan pejabat tertentu. Ada pula yang memanfaatkan jaringan internal untuk memperlancar promosi, mutasi, atau jabatan strategis. Akhirnya, profesionalisme terkikis, digantikan oleh “siapa kenal siapa” sebagai ukur keberhasilan.

Masyarakat tentu tidak buta melihat praktik semacam ini. Mereka bisa merasakan perbedaan pelayanan: ketika seorang warga biasa harus berhari-hari menunggu keadilan, sementara orang yang memiliki “orang dalam” bisa mendapatkan jalan pintas. Dari sinilah lahir ungkapan sinis bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ungkapan ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari pengalaman nyata masyarakat yang berkali-kali merasa diperlakukan tidak adil.

Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa kolusi bukan sekadar persoalan etika, melainkan penyakit kronis yang merusak jantung institusi. Ia menciptakan ketidakadilan yang nyata, memperlebar

jarak antara Polri dengan rakyat, sekaligus melemahkan integritas lembaga dari dalam. Selama praktik semacam ini masih berlangsung, sulit bagi Polri untuk membangun kepercayaan publik, sebab rakyat melihat sendiri bahwa keadilan yang seharusnya ditegakkan justru sering ditawar-menawar di ruang gelap relasi kolusif.

Bahaya kolusi tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga menggerogoti moral internal Polri. Anggota yang bekerja dengan jujur merasa terpinggirkan, bahkan terkadang dianggap naif. Budaya kerja yang sehat berubah menjadi budaya saling melindungi kesalahan. Akhirnya, muncul lingkaran setan: kolusi melahirkan ketidakadilan, ketidakadilan melahirkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan membuat Polri semakin jauh dari rakyat yang semestinya dilindungi.

Jika dibiarkan, kolusi akan menjelma seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Ia menular dari generasi ke generasi, dari senior ke junior, hingga menjadi “normal baru” yang diterima begitu saja. Padahal, kolusi sejatinya adalah racun yang mengikis inti marwah kepolisian: keadilan.

## **Gaya Hidup Hedon sebagai Borok yang Mempermalukan**

Di tengah masyarakat yang masih banyak bergelut dengan kesulitan ekonomi, pandangan anggota



Polri dengan gaya hidup serba mewah menjadi kontras yang menyakitkan. Foto-foto yang beredar di media sosial tentang polisi yang mengenakan jam tangan berharga ratusan juta, berpose dengan mobil sport, atau berlibur ke luar negeri dengan kemewahan berlebihan, seketika menjadi bahan cibiran publik. Apa yang sebenarnya hanya segelintir oknum, sayangnya dengan cepat melekat pada citra institusi secara keseluruhan. Masyarakat lalu bertanya-tanya: dari mana semua itu berasal, bila gaji resmi polisi sejatinya tidak memungkinkan untuk menopang gaya hidup demikian?

Fenomena ini memperkuat dugaan adanya praktik penyalahgunaan jabatan, pungutan liar, hingga keterlibatan dalam bisnis gelap. Gaya hidup hedon bukan sekadar soal selera pribadi, tetapi menjadi indikator adanya anomali dalam integritas seorang aparat penegak hukum. Lebih buruk lagi, ketika gaya hidup mewah itu dipertontonkan tanpa rasa bersalah, publik merasa seolah-olah polisi justru ingin menunjukkan jarak kelas sosial antara dirinya dengan rakyat yang harus dilindungi. Dari titik inilah lahir kecemburuan sosial yang merusak hubungan emosional antara polisi dan masyarakat.

Kasus-kasus yang sempat mencuat memperlihatkan betapa seriusnya masalah ini. Ada perwira tinggi yang ketahuan memiliki rekening gendut bernilai fantastis, namun proses penindakan berjalan lambat dan tidak transparan. Ada pula anggota yang diduga terlibat dalam praktik pencucian uang melalui gaya hidup glamor yang sulit dijelaskan

asal-usulnya. Publik menangkap pesan sederhana: kepolisian yang seharusnya tampil sederhana dan berwibawa justru terjebak dalam budaya pamer kekayaan yang jauh dari nilai pengabdian.

Gaya hidup hedon juga berimplikasi pada melemahnya moral internal. Anggota-anggota muda yang melihat seniornya hidup bergelimang kemewahan cenderung terjebak dalam dua sikap: frustrasi karena merasa sistem karier tidak adil, atau ikut mencari jalan pintas dengan cara-cara yang menyimpang demi memperoleh hal serupa. Alih-alih menjadi teladan, polisi yang memamerkan kekayaan justru menormalisasi perilaku menyimpang dan menularkan budaya konsumtif yang menggerus nilai-nilai dasar kepolisian.

Bagi masyarakat, fenomena ini mempertegas jurang kepercayaan yang semakin dalam. Jika aparat yang seharusnya menjadi teladan justru sibuk memperlihatkan kemewahan yang mencurigakan, bagaimana mungkin rakyat percaya bahwa penegakan hukum dijalankan dengan adil? Pada titik tertentu, gaya hidup hedon menjadi borok yang mempermalukan: tidak hanya merusak nama pribadi, tetapi juga mencederai marwah institusi Polri di mata publik.

## **Dampak Terhadap Legitimasi Institusi**

Masalah arogansi, kolusi, dan gaya hidup hedon yang ditunjukkan segelintir oknum anggota Polri

bukanlah persoalan kecil. Dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar mencoreng nama pribadi. Di mata publik, perilaku menyimpang itu segera melekat pada citra seluruh institusi. Masyarakat jarang membedakan antara individu dan lembaga; apa yang dilakukan satu atau dua oknum sering dianggap sebagai representasi budaya kerja kepolisian secara keseluruhan. Akibatnya, kepercayaan publik kepada Polri terkikis, bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya dijalankan dengan baik.

Tidak jarang, keberhasilan polisi mengungkap kasus besar atau melakukan terobosan pelayanan publik tenggelam di balik sorotan negatif terhadap perilaku oknum yang menyimpang. Satu kasus suap, satu pameran kekayaan mencurigakan, atau satu tindakan arogansi di jalan raya bisa menghapus ratusan kisah pengabdian polisi di pelosok desa yang bekerja tulus tanpa pamrih. Ketidakadilan persepsi ini memang pahit, tetapi menjadi kenyataan yang harus dihadapi Polri dalam era keterbukaan informasi dan media sosial.

Lebih jauh, perilaku menyimpang itu juga menyulitkan agenda reformasi kepolisian yang tengah digalakkan. Setiap wacana reformasi birokrasi, modernisasi teknologi, hingga peneguhan identitas sipil Polri akan terasa kosong bila di saat yang sama publik masih melihat oknum polisi terlibat kolusi atau memamerkan kemewahan yang tidak wajar. Reformasi yang semestinya menjadi upaya membangun kembali kepercayaan publik justru terhambat karena bayang-bayang kasus lama yang

tidak kunjung hilang.

Dengan demikian, dampak perilaku segelintir oknum tidak bisa dianggap remeh. Ia merusak legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum, menurunkan kepercayaan publik, dan memperlambat laju reformasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Polri hanya bisa benar-benar maju jika mampu menuntaskan problem internal ini, sehingga setiap langkah reformasi tidak lagi dibayangi oleh citra buruk yang diciptakan oleh segelintir orang.

## **Jalan Keluar**

Kritik terhadap arogansi, kolusi, dan gaya hidup hedon di tubuh Polri tidak boleh berhenti pada keluhan belaka. Ia harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang bisa mengembalikan marwah kepolisian sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Jalan keluar itu, pertama-tama, terletak pada penegakan etik dan disiplin yang sungguh-sungguh. Selama ini, publik kerap melihat sanksi etik hanya sebagai seremoni atau formalitas administratif yang tidak memberi efek jera. Jika Polri ingin dipercaya, maka setiap pelanggaran—kecil atau besar—harus ditindak tegas dan transparan. Hanya dengan konsistensi semacam itu, publik akan yakin bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan di dalam tubuh kepolisian sekalipun.

Langkah berikutnya adalah memastikan transparansi kekayaan pejabat kepolisian. Di tengah sorotan publik terhadap harta mencurigakan yang

kerap muncul, keterbukaan menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan. Laporan kekayaan tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen administratif yang disimpan di lemari birokrasi, melainkan harus dapat diaudit, ditinjau ulang, dan diklarifikasi secara terbuka bila muncul kejanggalan. Transparansi ini bukan sekadar soal angka, melainkan cermin komitmen moral bahwa polisi bekerja demi negara, bukan demi memperkaya diri.

Namun, reformasi tidak akan menyentuh akar jika hanya berhenti di ranah penegakan aturan dan keterbukaan administratif. Yang lebih penting adalah membangun kultur rendah hati dan pengabdian di akar rumput. Polisi yang hadir di tengah masyarakat bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai sahabat dan pelindung. Budaya melayani ini hanya bisa tumbuh jika pendidikan kepolisian menekankan nilai-nilai kesederhanaan, empati, dan tanggung jawab sosial sejak tahap rekrutmen hingga pembinaan karier. Dari situlah lahir identitas kepolisian yang benar-benar sipil, yang legitimasinya tumbuh dari hati rakyat, bukan sekadar dari seragam dan pangkat.

## Penutup

Polri, sebagai institusi sipil yang memegang peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tidak bisa membiarkan dirinya terus dirongrong

oleh perilaku arogan, praktik kolusi, dan gaya hidup hedon sebagian anggotanya. Setiap penyimpangan itu, betapapun dilakukan oleh segelintir oknum, akan berdampak luas pada legitimasi institusi. Kepercayaan publik yang retak sulit dipulihkan, dan agenda reformasi yang sudah berjalan menjadi tersendat.

Namun, kritik keras ini tidak berarti menutup ruang bagi harapan. Justru sebaliknya, sorotan publik adalah peluang untuk berubah. Dengan menegakkan disiplin secara tegas, membuka diri terhadap transparansi, serta membangun kultur pengabdian yang rendah hati, Polri dapat kembali merebut simpati masyarakat. Transformasi ini memang menuntut keberanian, karena ia menyentuh akar budaya organisasi yang sudah lama terbentuk. Tetapi tanpa langkah berani itu, Polri akan terus terjebak dalam bayang-bayang krisis legitimasi.

Akhirnya, jalan menuju kepolisian yang benar-benar profesional, humanis, dan demokratis adalah jalan panjang yang harus ditempuh bersama. Polri membutuhkan dukungan masyarakat, namun dukungan itu hanya akan hadir bila masyarakat benar-benar melihat perubahan nyata. Saat polisi kembali dikenal bukan karena arogansinya, melainkan karena ketulusan pengabdiannya, maka di situlah kepercayaan yang hilang dapat dipulihkan, dan marwah Polri sebagai penjaga demokrasi akan kembali tegak.[]